

# Analisis Informasi Keuangan Dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi

Rimky Mandala Putra Simanjuntak<sup>1</sup>, Sahala Purba<sup>2</sup>,  
Erissa Antheresya Butar Butar<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Methodist Indonesia  
EMail: sahalas24@gmail.com

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the financial performance of regional administrators in terms of: (1) scale of regional financial autonomy, (2) scale of regional independence, (3) scale of fiscal decentralization, (4) PAD - Effectiveness Scale, (5) PAD Efficiency Scale, (6) Regional Fiscal Success Scale, (7) Regional Fiscal Efficiency Scale, and (8) BUMD Contribution Size Scale. This study is a quantitative descriptive study with the research item Financial Information for the Administration of Dairi Regency Area in 2013-2020 and the research item Budget Realization Information, Balance Sheet and Regency PAD Income Detailed Information. The data collection technique used is the documentation method. The data analysis technique used is financial analysis. The results of the survey show that the financial performance of the Dairi Regency Regional Administrator in the years 2013-2020: (1) The Financial Autonomy Scale is still very low with an average value of 9.40%, (2) the Regional Financial Independence Scale is very low high with an average of 80.54%, (3) Fiscal decentralization scale with an average of 6.89% so very low. (4) The PAD effectiveness scale in 2013-2020 was 97.44% on average and included in the sufficient size. (5) The PAD efficiency scale is very efficient with an average value of 0.92%. (6) The tax effectiveness scale is 96.28% and is included in a reasonably effective measure. (7) The Regional Fiscal Efficiency Scale can be described as efficient with an average value of 6.54%. (8) The amount of the BUMD contribution with an average value of 13.23% shows that the contribution of the BUMD to the regional original income is very small.*

**Keywords:** *Financial Information Analysis, Financial Performance, District Government*

## ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menganalisis performa finansial Penyelenggara wilayah dilihat dari: (1) Skala Otonomi Finansial Wilayah, (2) Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah, (3) Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus, (4) Skala Keefektifan PAD, (5) Skala Keefisienan PAD, (6) Skala Keefektifan Fiskus wilayah, (7) Skala Keefisienan Fiskus wilayah dan (8) Skala Ukuran Sumbangan BUMD. Riset ini merupakan riset deskriptif kuantitatif dengan Subjek Riset informasi Finansial penyelenggara wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2013-2020, dan objek riset Informasi Realisasi Anggaran, Neraca, dan Informasi Rincian Pemasukan PAD Kabupaten. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis skala finansial. Hasil riset menunjukkan Performa Finansial Penyelenggara wilayah Kabupaten Dairi tahun 2013-2020: (1)

Skala Otonomi Finansial masih sangat rendah sekali dengan nilai rata-rata sebesar 9,40%, (2) Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 80,54%, (3) Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus dengan rata-rata sebesar 6,89% sehingga dapat dinyatakan rendah sekali. (4) Skala Keefektifan PAD pada tahun 2013-2020 mengungkapkan nilai rata-rata sebesar 97,44% dan masuk dalam ukuran cukup. (5) Skala Keefisienan PAD didapat sangat efisien dengan nilai rata-rata sebesar 0,92%. (6) Skala Keefektifan Fiskus sebesar 96,28% dan masuk dalam ukuran cukup efektif. (7) Skala Keefisienan Fiskus wilayah dengan nilai rata-rata sebesar 6,54% dapat nyatakan efisien (8) Ukuran Sumbangan BUMD dengan nilai rata-rata sebesar 13,23% bisa disebutkan bahwa sumbangan BUMD terhadap Penghasilan asli wilayah sangat rendah.

**Kata Kunci:** analisis informasi finansial, performa finansial, pemerintah kabupaten

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggara pusat telah mengeluarkan dua undang-undang (UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah, 2014) dan (UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Wilayah, 2004). Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diinginkan Penyelenggara wilayah dapat menaikkan kebahagiaan dan kemakmuran warga melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Hal ini disebabkan telah terjadi desentralisasi sehingga menghasilkan kemudahan dalam pengendalian bagi penyelenggara dibandingkan dengan sentralisasi, pada saat sudah dilaksanakan UU nomor 23 Tahun 2014 maka Penyelenggara wilayah telah diserahkan tanggung jawab yang menekan lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri program penyelenggaran wilayah (Dora dalam jurnal (Siswanto & Maylani, 2022)). Dengan adanya modifikasi sistem pemerintahan juga membawa modifikasi pada sistem hubungan finansial dalam perwujudan otonomi wilayah antara Penyelenggara pusat dan Penyelenggara wilayah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Untuk mewujudkan penyelenggaran otonomi wilayah, maka penyelenggara wilayah diminta untuk melaksanakan program pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat menaikkan peran serta warga dalam pembangunan infrastruktur, serta menaikkan kesetaraan dan keadilan dengan menumbuhkan semua kapasitas yang dipunyai oleh masing-masing wilayah. Otonomi wilayah dapat diyakini sebagai konsep pembangunan dengan menyerahkan tanggung jawab secara luas bagi penyelenggara wilayah dari pusat untuk menaikkan PADnya. Desakan terhadap kenaikan PAD semakin baik seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan Penyelenggara pusat terhadap Penyelenggara wilayah. Jika dilihat dana perimbangan yang dicairkan dari Penyelenggara pusat ke Penyelenggara wilayah cukup besar tetapi diharapkan penyelenggara wilayah harus kreatif dalam mengalih sumber daya yang ada dalam wilayah tersebut untuk dapat menoptimal perolehan PAD. Oleh karena itu, peneyelenggara wilayah diharapkan dapat mengalih yang dapat menaikkan PADnya. Salah satu kesuksesan peneyelenggara wilayah adalah ketika dapat mengelola finansial sesuai dengan regulasi yang sudah diterbitkan (Susilawati et al., 2018)

Pengendalian finansial wilayah berarti semua program-program seperti Persiapan, perwujudan, administrator, pemberitaan, reponsibility, dan pengawasan finansial wilayah. Aspek yang paling utama dalam pembangunan wilayah adalah adanya pengendalian finansial wilayah yang baik, adanya keterbukaan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang ada. Pengelolaan finansial wilayah harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar dapat mencapai good governance yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Kebebasan dalam melaksanakan belanja APBD-nya harus betul-betul yang tepat sasaran. Oleh sebab itu penyelenggara wilayah harus dapat mengoptimalkan sumber daya dalam menaikkan PADnya. Pada setiap akhir periode penyelenggara wilayah akan menyajikan informasi finansial sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Informasi finansial ini nantinya akan dapat digunakan untuk menganalisis nilai sumber daya ekonomi yang bisa digunakan untuk program pemerintahan, penilaian Keefektifan dan keefisienan suatu entitas peinformasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Informasi finansial yang akan dianalisis dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada yang membutuhkan mengenai bagaimana cara memahami informasi finansial tersebut, dan bagaimana dalam menafsirkan angka-angka yang terdapat dalam informasi finansial, bagaimana penilaian informasi finansial serta bagaimana pemakai informasi finansial dalam pengambilan putusan (Mahmudi, 2016). Pengukuran performa penyelenggara wilayah memiliki banyak tujuan, diantaranya yaitu untuk menaikkan performa dan menaikkan akuntabilitas penyelenggara wilayah. Akuntabilitas bukan hanya sekedar menyebutkan cara uang publik digunakan tetapi harus bisa mengungkapkan apakah uang publik tersebut telah digunakan dengan tepat sasaran secara efektif dan efisien. Pengukuran performa finansial ini dapat dipakai dalam mengukur analisis skala finansial, balanced scorecard dan juga value for money (Munandar, 2017)

Analisis performa finansial wilayah dapat dipakai pemakai informasi finansial wilayah untuk memahami performa penyelenggara wilayah. Adapun analisis yang dipakai adalah skala finansial sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Kabupaten Dairi ini adalah pecahan dari Kabupaten Tapanuli Utara tahun 1964 yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 15 Kecamatan, 8 keluarahan serta 161 desa. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan Kabupaten Dairi adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam mengalih potensi alam yang begitu luas dan subur, sehingga dapat menaikkan penghasilan asli daerah tersebut, tetapi kenyataan yang dihadapi sekarang ini pemerintahan daerah Kabupaten dairi sangat mengharapkan bantuan dari pusat dalam menutupin biaya operasional dalam menyelenggarakan pemerintahan, bisa dikatakan pemerintah gagal melalukan pemekaran kabupaten karena kabupaten yang dimekarkan akan menambah belanja negara dalam mendanai operasional pemerintahan daerah yang dimekarkan.

Adapun kegunaan dari Riset ini adalah untuk memperkaya pengetahuan dan tindak lanjut oleh pengambilan keputusan melalui analisis perbandingan laporan finansial pemerintahan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Dairi, sehingga kedepannya dapat diperbaiki untuk menaikkan kinerja pemerintah daerah

dalam melayani masyarakat dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Dairi dan juga sumber daya manusia yang dimilikinya.

Skala otonomi finansial wilayah adalah skala yang dapat dipakai untuk mengevaluasi otonomi finansial penyelenggara wilayah dalam rangka membiayai pembangunan, layanan kepada warga, dan program pemerintahan lainnya. Skala Otonomi keuangan Wilayah dinampakkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan penghasilan wilayah yang berasal dari sumber lain atau penghasilan transfer. Semakin tinggi skala otonomi finansial wilayah berarti semakin tinggi pula otonomi finansial wilayah (Abdul Halim, 2012).

Skala Ketidakmandirian finansial wilayah dikalkulasi dengan cara membandingkan total penghasilan transfer yang diterima oleh pemasukan wilayah dengan total pemasukan wilayah Provinsi (Mahmudi, 2016) Semakin tinggi skala ini maka semakin besar tingkat Ketidakmandirian penyelenggara wilayah terhadap Penyelenggara pusat.

Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus merupakan tolok ukur kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan penyelenggara pusat kepada penyelenggara wilayah untuk mengelola dan memaksimumkan penghasilan. Ukuran desentralisasi merupakan salah satu skala finansial yang dapat dipakai untuk mengatakan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan penyelenggara pusat kepada penyelenggara wilayah dalam melaksanakan pembangunan. Skala ini mengatakan ukuran sumbangan PAD terhadap total pemasukan wilayah. Semakin tinggi sumbangan PAD maka semakin tinggi pula kemampuan penyelenggara wilayah dalam melaksanakan desentralisasi (Bisma & Susanto, 2010).

Skala Keefektifan mencerminkan kemampuan penyelenggara wilayah dalam mewujudkan penghasilan asli wilayah yang diprogramkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah. Skala Keefektifan dimaksudkan untuk membahas seberapa besar Keefektifan dari program finansial yang dilaksanakan penyelenggara wilayah. Skala Keefektifan PAD mengatakan kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016)

Skala Keefisienan PAD perlu dikalkulasi untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan penyelenggara wilayah dalam menyelenggarakan program untuk mendapatkan realisasi penghasilan. Skala ini dikalkulasi dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan penyelenggara wilayah untuk mendapatkan PAD dengan realisasi PAD (Mahmudi, 2016). Semakin kecil nilai skala ini maka semakin efisien performa penyelenggara wilayah dalam melakukan pengumpulan penghasilan asli wilayah (Abdul Halim, 2012)

Keefektifan (hasil guna) adalah ukuran kesuksesan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Keefektifan merupakan perbandingan outcome dan output. Outcome merupakan dampak suatu program atau program terhadap warga sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Mahsun, 2019). Analisis efektifitas fiskus wilayah yaitu analisis yang mencerminkan kemampuan pemerintah wilayah dalam target/anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah (Abdul Halim, 2012).

Keefisienan berhubungan dengan metode operasi, suatu program dapat dinyatakan efisien apabila suatu produk yang dihasilkan dengan memakai sumber daya dan dana serendah-rendahfisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi biaya untuk mendapatkan pemasukan wilayah dan input merupakan realisasi dari pemasukan wilayah (Mahsun, 2019). Performa penyelenggara wilayah dalam melakukan pengumpulan fiskus wilayah diukurkan efisien apabila skala yang dicapai kurang dari 10% atau semakin kecil nilai skala maka semakin baik/efisien.

BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 (UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah, 2014) dan Pasal 1 angka 1 (PP, 2017) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh wilayah. Skala ini berguna untuk mengetahui tingkat sumbangan perusahaan wilayah dalam mendukung penghasilan wilayah. Skala ini dikalkulasi dengan cara membandingkan pemasukan wilayah dari hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan dengan total pemasukan Penghasilan Asli Wilayah (Mahmudi, 2016)

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode dalam riset ini adalah menggunakan deskriptif kuantitatif dengan melihat laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK Sumatera utara selama tahun 2013-2020. Teknik pengumpulan data memakai Teknik dokumentasi. Langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan skala terhadap data finansial yang diperoleh. Kemudian data tersebut dianalisis sesuai teori dalam sumber dan dideskripsikan dengan memakai kalimat maupun gambar yang dapat memberikan penjelasan mengenai performa finansial (Taras & Artini, 2017) Analisis Informasi finansial dipakai dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam informasi finansial (Mahsun, 2019). Analisis performa finansial yang dilaksanakan pada riset ini dilaksanakan untuk menghasilkan informasi mengenai performa finansial penyelenggara wilayah Kabupaten Dairi sebagai bahan dalam pengambilan putusan dan penialain terhadap performa finansial penyelenggara wilayah dalam kurun waktu 2013-2020. Skala yang dipakai pada riset ini meliputi: Rasiko Otonomi Finansial, Wilayah, Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah, Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus, Skala Keefektifan PAD, Skala Keefisienan PAD, Skala Keefektifan Fiskus wilayah, Skala Keefisienan Fiskus wilayah, Skala Ukuran Sumbangan BUMD. Data yang dipakai dalam riset ini berupa Informasi Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2013-2020.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Skala Otonomi**

Skala Otonomi ini untuk mengukur seberapa besar kontribusi realisasi total PAD dibandingkan dengan penghasilan transfer yang diperoleh oleh Kabupaten Dairi setiap tahunnya, jika rasionya semakin kecil berarti kontribusi realisasi total PAD sangat rendah terhadap penghasilan wilayah, ini berarti pemerintah Kabupaten Dairi selalu mengharapkan dari pusat untuk menutupin biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dairi. Dari hasil pengamatan selama tahun 2013-2020 didapat rasionya dibawah 25% artinya bahwa kemampuan finansial Kabupaten Dairi sangat rendah sekali dengan pola hubungan instruktif.



**Tabel 1 : Skala Otonomi**

Tahun	Realisasi Total PAD	Penghasilan Transfer	Skala	Kemampuan Finansial	Pola Hubungan
2013	29.933.428.377,08	678.334.557.335,00	4,41%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2014	53.525.854.131,23	707.094.466.600,00	7,57%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2015	58.791.848.521,21	819.249.914.805,00	7,18%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2016	68.003.241.760,34	975.996.543.461,00	6,97%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2017	128.489.751.332,00	645.607.668.228,00	19,90%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2018	73.906.829.603,45	951.857.095.064,00	7,76%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2019	74.360.339.717,75	826.507.837.823,00	9,00%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2020	89.758.997.873,48	721.297.798.264,00	12,44%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
Rata2	72.096.286.414,57	790.743.235.197,50	9,40%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

Cat:		
Otonomi(%)	Kemampuan Finansial	Pola Hubungan
0% - 25%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah Sekali	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Parsipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi otonomi wilayah tersebut. (Abdul Halim, 2012)

**Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah**

Skala Ketidakmandirian finansial wilayah dipakai untuk menganalisis seberapa besar ketidakmandirian finansial wilayah dengan membandingkan antara penghasilan transfer dengan penghasilan wilayah, jika rasionya besar, ini berarti pemerintahan Kabupaten Dairi sangat tergantung kepada pemerintah pusat untuk mendanai operasional penyelenggaraan pemerintahannya. Dari hasil pengamatan yang peneliti analisis selama tahun 2013-2022 cenderung mengalami penurunan dari Tinggi ke Sedang.

**Tabel 2 : Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah**

Tahun	Penghasilan Transfer	Penghasilan Wilayah	Skala	Ketidakmandirian
2013	678.334.557.335,00	719.212.829.712,08	94,32%	Tinggi
2014	707.094.466.600,00	766.415.851.556,23	92,26%	Tinggi
2015	819.249.914.805,00	889.613.804.786,21	92,09%	Tinggi
2016	975.996.543.461,00	1.062.706.591.682,24	91,84%	Tinggi
2017	645.607.668.228,00	1.386.843.211.560,00	46,55%	Rendah
2018	951.857.095.064,00	1.080.878.465.095,45	88,06%	Tinggi
2019	826.507.837.823,00	1.167.522.159.074,00	70,79%	Sedang
2020	721.297.798.264,00	1.054.826.116.417,00	68,38%	Sedang
Rata2	790.743.235.197,50	1.016.002.378.735,43	80,54%	Rendah Sekali

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

Cat:	
Ketidakmandirian(%)	Kemampuan Finansial
0% - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi Ketidakmandirian wilayah terhadap penyelenggara pusat.

(Mahmudi, 2016)

### Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus

Skala ini mengukur seberapa besar ukuran desentralisasi fiskus dalam menghasilkan penghasilan asli wilayah dengan mengukur penghasilan asli wilayah dengan penghasilan wilayah, semakin tinggi rasionya maka semakin optimal penyelenggaraan wilayah dalam memperoleh penghasilan asli wilayahnya tersebut (Mahmudi, 2016). Dari hasil pengamatan selama tahun 2013-2020 rasionya dikategorikan rendah sekali.

**Tabel 3 : Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus**

Tahun	Penghasilan Asli Wilayah	Penghasilan Wilayah	Skala	Indikator
2013	29.933.428.377,08	719.212.829.712,08	4,16%	Rendah Sekali
2014	53.525.854.131,23	766.415.851.556,23	6,98%	Rendah Sekali
2015	58.791.848.521,21	889.613.804.786,21	6,61%	Rendah Sekali
2016	68.003.241.760,34	1.062.706.591.682,24	6,40%	Rendah Sekali
2017	128.489.751.332,00	1.386.843.211.560,00	9,26%	Rendah Sekali
2018	73.906.829.603,45	1.080.878.465.095,45	6,84%	Rendah Sekali
2019	74.360.339.717,75	1.167.522.159.074,00	6,37%	Rendah Sekali
2020	89.758.997.873,48	1.054.826.116.417,00	8,51%	Rendah Sekali
Rata2	72.096.286.414,57	1.016.002.378.735,43	6,89%	Rendah Sekali

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

Indikator	
Skala	Keterangan
0 -10%	Rendah Sekali
10 - 30%	Rendah
31- 40%	Cukup
41 - 50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Semakin tinggi sumbangan PAD maka semakin tinggi pula kemampuan penyelenggara wilayah dalam melaksanakan desentralisasi (Bisma & Susanto, 2010).

### Skala Keefektifan PAD

Skala Keefektifan PAD mencerminkan kemampuan penyelenggara wilayah dalam mewujudkan penghasilan asli wilayah yang diprogramkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah. Skala Keefektifan PAD mengatakan kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Hasil riset mengatakan bahwa nilai skala Keefektifan PAD Kabupaten Dairi tahun 2013-2020 cukup fluktuatif. Nilai Skala Keefektifan PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 138,97% dan nilai skala terendah pada tahun 2018 sebesar 74,74%. Rata-rata nilai skala Keefektifan PAD Kabupaten Dairi masuk dalam ukuran cukup efektif.

**Tabel 4: Skala Keefektifan PAD**

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Skala	Kemampuan Finansial
2013	29.933.428.377,08	21.539.585.686,00	138,97%	Sangat Efektif
2014	53.525.854.131,23	59.623.358.250,00	89,77%	Kurang Efektif
2015	58.791.848.521,21	74.240.389.534,00	79,19%	Kurang Efektif
2016	68.003.241.760,34	65.844.330.338,63	103,28%	Sangat Efektif
2017	128.489.751.332,00	123.494.508.015,00	104,04%	Sangat Efektif
2018	73.906.829.603,45	98.882.460.926,00	74,74%	Kurang Efektif
2019	74.360.339.717,75	86.180.996.000,00	86,28%	Cukup Efektif
2020	89.758.997.873,48	86.927.335.000,00	103,26%	Sangat Efektif
Rata2	72.096.286.414,57	77.091.620.468,63	97,44%	Cukup Efektif

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

Keefektifan Finansial Wilayah Otonom	
Skala Efektifitas (%)	Kemampuan Finansial
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif
Semakin tinggi skala maka semakin tinggi kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)	

### Skala Keefisienan PAD

**Tabel 5: Perhitungan Skala Keefisienan PAD**

Tahun	Biaya Perolehan PAD	Realisasi PAD	Skala	Kemampuan Finansial
2013	410.133.617,00	29.933.428.377,08	1,37%	Sangat Efisien
2014	736.050.000,00	53.525.854.131,23	1,38%	Sangat Efisien
2015	558.751.411,00	58.791.848.521,21	0,95%	Sangat Efisien
2016	629.298.145,00	68.003.241.760,34	0,93%	Sangat Efisien
2017	666.666.055,00	128.489.751.332,00	0,52%	Sangat Efisien
2018	252.418.380,00	73.906.829.603,45	0,34%	Sangat Efisien
2019	773.815.089,00	74.360.339.717,75	1,04%	Sangat Efisien
2020	759.701.196,00	89.758.997.873,48	0,85%	Sangat Efisien
Rata2	598.354.236,63	72.096.286.414,57	0,92%	Sangat Efisien

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

Keefisienan Finansial Wilayah Otonom	
Keefisienan (%)	Kemampuan Finansial
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien
Semakin tinggi skala maka semakin tinggi kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)	

Skala Keefisienan PAD ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien penyelenggara pemerintah dalam melakukan pemungutan biaya perolehan PAD dibandingkan dengan realisasi PAD yang diperoleh pada periode tersebut, semakin kecil rasionya maka semakin efisien penyelenggaraan pemerintah dalam melakukan pembiayaan perolehan PAD. Dari hasil pengamatan menyatakan bahwa keefisienan PAD selama tahun 2013-2020 cukup fluktuatif dengan adanya kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, dimana skala keefisienan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,38% sedangkan terendahnya terdapat di tahun 2018 sebesar 0,34%. Tetapi semuanya masih dalam kategori sangat efisien

### Skala Keefektifan Fiskus wilayah

Analisis efektifitas fiskus wilayah yaitu menganalisis kemampuan pemerintah wilayah dalam mendapatkan penghasilan asli wilayah dengan cara membandingkan realisasi fiskus wilayah dengan anggara fiskus wilayah (Abdul Halim, 2012). Hasil riset mengatakan kalau nilai Keefektifan fiskus wilayah Kabupaten Dairi tahun 2013-2020 cukup fluktuatif dengan adanya beberapa kenaikan dan pengurangan setiap tahun. Nilai Keefektifan fiskus wilayah paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 123,91% atau mengalami kenaikan sebesar 30,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara nilai terendah terjadi di tahun 2020 sebesar 75,67%.



**Tabel 6: Skala Keefektifan Fiskus wilayah**

Tahun	Realisasi Fiskus wilayah	Anggaran Fiskus wilayah	Skala
2013	4.792.980.780,05	4.720.000.000,00	101,55%
2014	7.339.512.429,00	7.226.000.000,00	101,57%
2015	7.715.031.033,50	8.266.000.000,00	93,33%
2016	8.654.027.559,70	9.266.000.000,00	93,40%
2017	11.481.804.235,24	9.266.000.000,00	123,91%
2018	11.708.281.188,90	13.822.000.000,00	84,71%
2019	13.810.919.111,00	14.372.000.000,00	96,10%
2020	13.398.479.706,00	17.706.000.000,00	75,67%
Rata-rata	9.862.629.505,42	10.580.500.000,00	96,28%

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

Keefektifan Finansial Wilayah Otonom	
Skala Efektifitas (%)	Kemampuan Finansial
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif
Semakin tinggi skala maka semakin tinggi kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)	

### Skala Keefisienan Fiskus wilayah

**Tabel 7: Skala Keefisienan Fiskus wilayah**

Tahun	Biaya Pengumpulan Fiskus	Realisasi Fiskus Wilayah	Skala	Kemampuan Finansial
2013	410.133.617,00	4.792.980.780,05	8,56%	Efisien
2014	736.050.000,00	7.339.512.429,00	10,03%	Tidak Efisien
2015	558.751.411,00	7.715.031.033,50	7,24%	Efisien
2016	629.298.145,00	8.654.027.559,70	7,27%	Efisien
2017	666.666.055,00	11.481.804.235,24	5,81%	Efisien
2018	252.418.380,00	11.708.281.188,90	2,16%	Sangat Efisien
2019	773.815.089,00	13.810.919.111,00	5,60%	Efisien
2020	759.701.196,00	13.398.479.706,00	5,67%	Efisien
Rata-rata	598.354.236,00	9.862.629.505,42	6,54%	Efisien

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

Keefisienan Finansial Wilayah Otonom	
Keefisienan (%)	Kemampuan Finansial
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien
Performa penyelenggara wilayah otonom jika kurang dari 10% atau semakin kecil maka dapat dinyatakan semakin baik/efisien. (Mahsun, 2019)	

Performa penyelenggara wilayah dalam melakukan pengumpulan fiskus wilayah diukurkan efisien apabila skala yang dicapai kurang dari 10% atau semakin kecil nilai skala maka semakin baik atau efisien. Hasil riset mengatakan bahwa nilai skala keefisienan fiskus wilayah Kabupaten Dairi tahun 2013-2020 cukup fluktuatif dengan adanya beberapa kenaikan dan pengurangan setiap tahunnya. Nilai Skala keefisienan fiskus wilayah paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,03% atau mencerminkan tingkat keefisienan yang paling rendah dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai skala keefisienan fiskus wilayah terendah pada tahun 2018 sebesar 2,16% atau memiliki tingkat keefisienan paling tinggi. Meskipun nilai skala keefisienan fiskus wilayah selalu menemui kenaikan, akan tetapi tingkat keefisienan fiskus wilayah Kabupaten Dairi masuk dalam ukuran efisien.

### Skala Ukuran Sumbangan BUMD

Skala ini berguna untuk mengevaluasi sebesar besar laba BUMD dapat berkontribusi terhadap penghasilan wilayah Kabupaten Dairi dengan cara membandingkan laba BUMD dengan Realisasi PAD (Mahmudi, 2016). Hasil riset mengatakan bahwa nilai ukuran sumbangan BUMD Kabupaten Dairi tahun 2013-2020 cenderung fluktuatif. Skala ukuran yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 20,91% dan paling rendah pada tahun 2014 sebesar 7,81%.

**Tabel 8: Skala Ukuran Sumbangan BUMD**

Tahun	Laba BUMD	Realisasi PAD	Skala
2013	6.259.973.736,00	29.933.428.377,08	20,91%
2014	4.182.151.408,00	53.525.854.131,23	7,81%
2015	7.026.750.893,00	58.791.848.521,21	11,95%
2016	10.029.770.339,00	68.003.241.760,34	14,75%
2017	10.779.522.587,00	128.489.751.332,00	8,39%
2018	12.998.925.226,00	73.906.829.603,45	17,59%
2019	6.770.706.298,00	74.360.339.717,75	9,11%
2020	13.765.641.353,00	89.758.997.873,48	15,34%
Rata-rata	8.976.680.230,00	72.096.286.414,57	13,23%

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

### Pembahasan

Skala Otonomi Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 9,40% memiliki kemampuan finansial yang rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif. Dimana kemampuan Kabupaten Dairi dalam rangka membiayai pembangunan, layanan dan program pemerintahan masih sangat rendah sekali. Skala Ketidakmandirian Finansial Kabupaten Dairi untuk tahun 2013-2020 dengan rata-rata skala 80,54% memiliki tingkat Ketidakmandirian yang tinggi. Dimana Ketidakmandirian Kabupaten Dairi terhadap Penyelenggara pusat ialah tinggi. Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 6,89% memiliki tingkat sumbangan yang rendah sekali. Dimana kemampuan Kabupaten Dairi dalam mengelola dan memaksimalkan penghasilan masih rendah sekali. Skala Keefektifan PAD Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 97,44% memiliki kemampuan yang cukup efektif. Dimana kemampuan Kabupaten Dairi dalam mewujudkan Penghasilan Asli Wilayah yang diprogramkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah. Skala Keefisienan PAD Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 0,92% memiliki tingkat keefisienan yang sangat efisien. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa performa Kabupaten Dairi dalam melakukan pengumpulan PAD sangat efisien. Skala Keefektifan Fiskus wilayah Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 96,82% .

Skala Keefisienan Fiskus wilayah Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 6,54% memiliki tingkat keefisienan yang sangat efisien. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa performa Kabupaten Dairi dalam melakukan pengumpulan Fiskus wilayah sangat efisien. Skala Ukuran Sumbangan

BUMD Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 13,23%. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat sumbangan perusahaan wilayah terhadap penghasilan pemerintah Kabupaten Dairi cukup tinggi.

## **PENUTUP**

Beberapa kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skala Otonomi Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 – 2020 memiliki kemampuan finansial yang rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif.
2. Skala Ketidakmandirian Finansial Kabupaten Dairi untuk tahun 2013-2020 memiliki tingkat Ketidakmandirian yang tinggi.
3. Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 memiliki tingkat sumbangan yang rendah sekali.
4. Skala Keefektifan PAD Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 memiliki kemampuan yang cukup efektif.
5. Skala Keefisienan PAD Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 memiliki tingkat keefisienan yang sangat efisien.
6. Skala Keefektifan Fiskus wilayah Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 – 2020 memiliki tingkat keefektifan yang sangat efektif.
7. Skala Keefisienan Fiskus wilayah Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 memiliki tingkat keefisienan yang sangat efisien.
8. Skala Ukuran Sumbangan BUMD Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 cukup tinggi.

Rekomendasi untuk Penyelenggara wilayah adalah agar dapat memaksimalkan pemasukan dari wilayah masing-masing agar dapat mempercepat penyusunan Perda dan mengubah tarif retribusi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyelenggara Kabupaten Dairi hendaknya mengoptimalkan penghasilan asli dari wilayahnya tersebut dan juga mendukung pelaku UMKM yang dapat menambah penghasilan asli dari wilayah Kabupaten Dairi, terlebih masih banyaknya sumber daya alam yang menganggur yang belum dapat dioptimalkan oleh pemerintahan daerah. Begitu juga kepada penyelenggara wilayah Kabupaten Dairi harus betul-betul membelanjakan sesuai dengan yang sudah dianggarkan secara efisien dan efektif serta melakukan pencatatan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, dan yang terakhir penyelenggara pemerintahan hendaknya melakukan sosialisasi melalui media massa ataupun media elektronik akan pentingnya melakukan pembayaran pajak dan mempermudah dalam pengurusan izin usaha dan memberikan penyuluhan bagaimana cara pembayaran pajak dengan mudah dan efektif, sehingga dengan adanya kemudahan-kemudahan ini maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak sehingga dapat menaikkan penghasilan asli daerah. Begitu juga dengan BUMD yang terdapat di wilayah penyelenggara Dairi agar dapat lebih optimal dalam pencapaian keuntungan BUMD yang dimiliki, sehingga juga dapat menghasilkan kenaikan pendapatan asli daerah tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.)*. Penerbit Salemba Empat.
- Bisma, & Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi*

- Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1-9*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019.
- Munandar, A. (2017). Dampak Akurasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. *Tesis*.
- PP. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*.
- Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195.
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98.
- Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.
- UU, R. (2014). *UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- UU RI. (2004). *UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.